

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Brotodihardjo, Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Haris Sanjaya, Umar, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, NFP Publishing, Sleman.
- Sidik, Salim H., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.
- Nugroho, Susanti Adi, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Pistone, Pasquale, Jennifer Roeleveld, Johann Hattingh, Joao Felix Pinto Nogueira, dan Craig West, 2019, *Fundamentals of Taxation : An Introduction to Tax Policy, Tax Law and Tax Administration*, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
- Posner, Richard A. 2014, *Economic Analysis of Law*. Aspen Publishers, Wolters Kluwer, New York.
- Pramono, Nindyo, dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Setiawan, 1999, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P, 2010, *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- . 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sri Y. Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignyosubroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elmas dan Huma, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834)

Peraturan Menteri Keuangan No.189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394)

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PK/N/1999 perihal Peninjauan Kembali perkara PT Wahana Pandugraha.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/N/2005 perihal Kasasi perkara PT Inti Mutiara Kimindo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 168/PK/Pdt.Sus/2012 perihal Peninjauan Kembali perkara PT Metrocorp Indonusa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 perihal Peninjauan Kembali perkara PT Yinchenindo Mining Industry.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 perihal Peninjauan Kembali perkara PT Industry Badja Garuda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### D. Artikel Jurnal

- Cendrico, Daniel, “Analisis Terhadap Kedudukan Piutang Pajak Sebagai Kreditur Preferen Berhadapan Dengan Kreditur Separatis Dalam Pembayaran Utang Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus- Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Premise Law Jurnal*, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Febianti, Agnes Ruth, Hendro Saptono, dan R Suharto, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istimewa Kantor Pelayanan Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditur Preferen Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit Berdasarkan Studi Kasus Kepailitan PT Metro Batavia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Morgan, Barbara K, “Should the Sovereign be Paid First? A Comparative International Analysis of the Priority for Tax Claims in Bankruptcy”, *American Bankruptcy Law Journal*, Vol. 74, No. 4, 2000.
- Murniati, Rilda, Sunaryo, dan Linda Dwiatin, “Gugurnya Hak Mendahulu Negara Atas Piutang Pajak dalam Kepailitan Perusahaan (Analisis Hukum Studi Kasus Putusan Perkara Kepailitan)”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35, No. 3. 2020.
- Nugroho, Adrianto Dwi, “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, No. 11, 2011.
- Putri, Litari Elisa, dan St. Laksanto Utomo, “Sinkronisasi Hukum Utang Pajak sebagai Kreditur Preferen dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rustamaji, Muhammad, “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Usman, Rachmadi, “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Wood, Philip R, “Principles of International Insolvency”, *International Insolvency Review*, Vol. 4, No. 7, 1995.

## **E. Tugas Akhir**

Arlukito, Hiazintus Yuriko, 2014, *Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Terhadap Hak Mendahulu Atas Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ayuningtyas, Annisa, 2017, *Pengaruh Kedudukan Buruh dalam Pembayaran Upah dan Hak-hak Lainnya Berdasarkan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Kedudukan Negara Dalam Pelunasan Utang Pajak Oleh Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dewi, Wilma Ika, 2009, *Kedudukan Utang Pajak Dalam Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Wulandari, Erika, 2021, *Penalaran Hukum Hakim Terhadap Hak Mendahulu Pembayaran Utang Pajak Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **F. Internet**

Aribowo, Irwan, “Apakah sama Kreditur Preferen dalam Penagihan Pajak dengan Kreditur Preferan menurut UU Kepailitan?,” <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/kreditur-preferen-dalam-pajak-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan-134017>, diakses 21 Maret 2023.

Baggins, Brian, “Adam Smith Reference Archive: An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations”, <https://www.marxists.org/reference/archive/smith-adam/works/wealth-of-nations/index.htm>., diakses 15 Februari 2023

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 15 Februari 2023.